

**RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**KECAMATAN DAWARBLANDONG**  
**TAHUN 2022**

**KATA PENGANTAR**

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun Anggaran 2023. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Mei 2022  
Pit. CAMAT DAWARBLANDONG



**AKHM**  
Pembina  
NIP. 19700626 199003 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

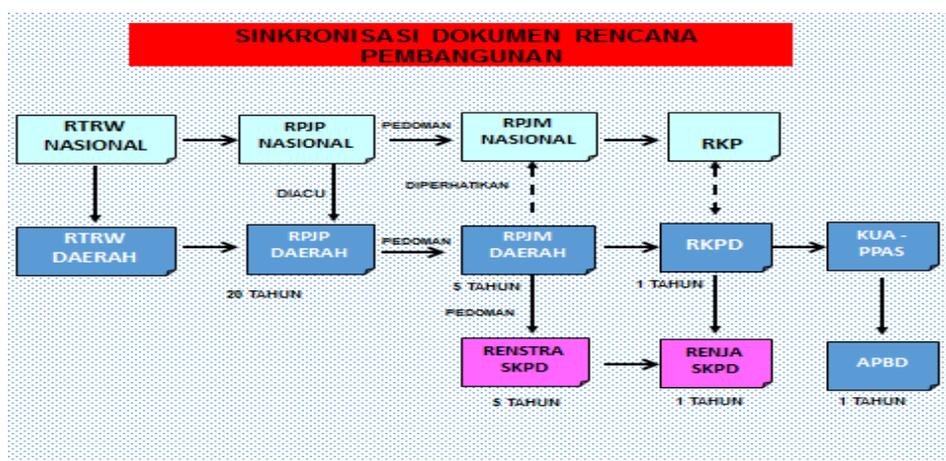
Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Dawarblandong adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Dawarblandong.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 )
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2023.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 )
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Dawarblandong sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

## BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

### BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

##### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong pada tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana table 2.1 berikut::

Tabel 2.1.

## Realisasi belanja pada Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA
					Rp.	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	865.900,00	87%	134.100,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	974.750,00	97%	25.250,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.065.185,00	2.287.583.361,00	77%	668.481.824,00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.677.300,00	97%	322.700,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000,00	11.016.000,00	98%	184.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.987.500,00	100%	12.500,00

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.000.000,00	235.591.400,00	96%	9.408.600,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.900.000,00	99%	100.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	9.946.750,00	99%	53.250,00
			Penyediaan Bahan/Material	16.787.634,00	16.730.000,00	100%	57.634,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	635.000.000,00	582.195.000,00	92%	52.805.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.960,00	20.137.152,00	57%	15.263.808,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	100%	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000,0 0	34.362.000,0 0	93%	2.638.000,0 0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.175.000,0 0	27.075.000,0 0	100 %	100.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000,00	4.907.500,00	98%	92.500,00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.000.000,0 0	10.839.000,0 0	64%	6.161.000,0 0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				-		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-		

			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60.000.000,0 0	55.902.000,0 0	93%	4.098.000,0 0
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.800.000,0 0	44.529.600,0 0	77%	13.270.400,00
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,0 0	37.931.000,0 0	95%	2.069.000,0 0
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.000.000,0 0	29.750.000,0 0	99%	250.000,00
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-		

		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-		
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.000.000,00	11.950.000,00	100%	50.000,00
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.500.000,00	25.140.000,00	99%	360.000,00
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.500.000,00	8.450.000,00	99%	50.000,00
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00	9.749.500,00	81%	2.250.500,00
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00	22.628.700,00	91%	2.371.300,00
			JUMLAH	4.343.828.779,00	3.563.219.413,00	82%	780.609.366,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**  
**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/ tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,88	74,40						
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi							

<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>81%</b>						
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7 dokumen						
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen							
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen							
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	6 dokumen						
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai</b>	<b>90%</b>	<b>82%</b>						

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	28 laporan						
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	30 laporan						
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks profesionalitas ASN Kecamatan Dawarblandong</b>	<b>67,15</b>	<b>65,21</b>	66	66	100%	67,15		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Stel						
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>						
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang	paket	1 paket						

		di sediakan kantor yang disediakan								
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	1 paket						
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 bulan						
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket						
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 Dokumen	12 bulan						
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket						
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	150 Laporan	12 bulan						

	SKPD	Konsultasi SKPD								
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>90 %</b>						
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 bulan						
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	2 orang						
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik</b>	<b>100%</b>	<b>90 %</b>						
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2 unit	2 unit						

	Operasional atau lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Gedung	3 unit						
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	25 Unit	1 paket						
<b>7.01.02.2.04.01</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>82%</b>	<b>81%</b>						
<b>7.01.02.2.04.02</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>500 Dokumen</b>	<b>500 Dokumen</b>						
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0 Dokumen	15 Dokumen						

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	385 Dokumen						
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82%</b>	<b>81%</b>						
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>76 fasilitasi</b>	<b>72 fasili-tasi</b>						
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 Dokumen	12 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	24 fasili-tasi						

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 fasili-tasi						
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 Dokumen	24fasili-tasi						

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Dawarblandong

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Mewujudkan pelayanan public yang optimal		IKM Kecamatan
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Pelayanan Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong  
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2025 (n+2)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah			74,40	76,58	77,88	79,18	80,48				79,18	Baik
2	Presentase Peningkatan Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan			80%	81%	82%	83%	84%				83%	Baik
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindak lanuti bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Masyarakat			80%	81%	82%	83%	84%				83%	Baik

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Dawarblandong diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebgaiian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong

#### - Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Dawarblandong bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Dawarblandong yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Dawarblandong;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

#### - Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.

4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Dawarblandong yang heterogen maka ini merupakan

peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Dawarblandong untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

#### **2.4 Review Terhadap RKPD**

Berdasarkan RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)  
 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023  
 Kabupaten Mojokerto**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan  
 Dawarblandong**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>77,88</b>	<b>3.040.426.960</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>77,88</b>	<b>3.040.426.960</b>	
			<b>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>	<b>1 Inovasi</b>				<b>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>	<b>1 Inovasi</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase indikator program Kecamatan Dawarblandong yang tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase indikator program Kecamatan Dawarblandong yang tercapai sesuai target</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	6.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Dawarblandong	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	6.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 laporan	6.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>2.734.551.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>2.734.551.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan	2.729.551.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang / bulan	2.729.551.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	5.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 dokumen	5.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	67,20	<b>35.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	67,20	<b>35.000.000</b>	

	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>andong</b>				<b>Perangkat Daerah</b>	<b>andong</b>				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	25.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	10.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>99.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>99.500.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	1 paket	8.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	30.000.000	
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	Penyediaan bahan Logistik Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.000.000	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	4.000.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	365 dokumen	4.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	7.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	7.500.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>81.375.960</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100 %</b>	<b>81.375.960</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	39.975.960	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	39.975.960	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	41.400.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>90 %</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>90 %</b>	<b>80.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 kendaraan	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 kendaraan	40.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	25 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	25 unit	15.000.000	

	Kantor atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi			
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>82%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>82%</b>	<b>10.000.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>500 pelayanan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>500 pelayanan</b>	<b>10.000.000</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 laporan	10.000.000	
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>82%</b>	<b>195.520.000</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>	<b>360.000.000</b>	
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan</b>	<b>76 fasilitasi</b>	<b>195.520.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan</b>	<b>76 fasilitasi</b>	<b>195.520.000</b>	

	Pemerintahan Desa		pemerintahan desa			Pemerintahan Desa		pemerintahan desa			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	28 dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	25.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 dokumen	120.520.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	<b>Kec. Dawarblandong</b>	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	24 dokumen	120.520.000	

<b>JUMLAH</b>	3.245.946.960	<b>JUMLAH</b>	3.245.946.960	
---------------	---------------	---------------	---------------	--

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3.

Tabel T-C. 3.2

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto

OPD: Kecamatan Dawarblandong

	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp)	OPD penanggung jawab

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Dawarblandong ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **1. Terwujudnya Pelayanan Public yang Optimal**

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	80	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74,40	76,58	77,88	79,18	80,48	81,78
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	81	82	83	84	85

**CASCADING KECAMATAN DAWARBLANDONG 2023**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI (3) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

**TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal**

**Indikator Tujuan : IKM**

**SASARAN : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan**

**SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal**

**Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan**

**Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai**

**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman,**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Nilai SAKIP Perangkat Daerah / Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

**Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan**

**Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
Persentase indikator program Kecamatan Dawarblandong yang tercapai sesuai target				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas ASN Kecamatan Dawarblandong		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan						Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik			Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan dengan Pembinaan dan Koordinasi	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan dengan Pembinaan dan Koordinasi	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Dawarblandong Tahun 2023 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah kabupaten Mojokerto yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dawarblandong untuk 5 tahun mendatang yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
    - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
    - 6) Penyediaan Bahan/Material
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
    - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Dawarblandong

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>77,78</b>	<b>3.008.926.960</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>7918</b>	<b>3.736.424.905</b>
		<b>Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan</b>		<b>1 Inovasi</b>				<b>1 Inovasi</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dawarblandong	2 Dokumen	7.500.000	APBD Kab		2 Dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Dawarblandong	1 Dokumen	0	APBD Kab		1 Dokumen	3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Dawarblandong	1 Dokumen	0	APBD Kab		1 Dokumen	3.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Dawarblandong	18 laporan	6.000.000	APBD Kab		18 laporan	10.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dawarblandong	24 orang/bulan	2.724.551.000	APBD Kab		24 orang/bulan	3.391.449.185

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Dawarblandong	17 dokumen	0	APBD Kab		17 dokumen	15.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Dawarblandong	30 paket	0	APBD Kab		30 paket	15.300.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Dawarblandong	30 Orang	10.000.000	APBD Kab		30 Orang	30.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Kec. Dawarblandong	1 paket	8.000.000	APBD Kab		1 paket	15.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	8 paket	30.000.000	APBD Kab		8 paket	120.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	1 Paket	20.000.000	APBD Kab		1 Paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	1 paket	5.000.000	APBD Kab		1 paket	6.500.000
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Dawarblandong	365 Dokumen	4.000.000	APBD Kab		365 Dokumen	5.000.000
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	1 Paket	25.000.000	APBD Kab		1 Paket	33.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Dawarblandong	150 Laporan	7.500.000	APBD Kab		150 Laporan	15.000.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	12 Laporan	39.975.960	APBD Kab		12 Laporan	45.675.720
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Dawarblandong	36 Laporan	41.400.000	APBD Kab		36 Laporan	54.000.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Dawarblandong	2 Kendaraan	40.000.000	APBD Kab		2 Kendaraan	45.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kec. Dawarblandong	2 Gedung	25.000.000	APBD Kab		2 Gedung	40.000.000

		Dipelihara/Direhabilitasi							
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Dawarblandong	25 Unit	15.000.000	APBD Kab		25 Unit	35.000.000
II	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>82%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>83%</b>	<b>45.000.000</b>
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>									
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kec. Dawarblandong	0	-	APBD Kab		15 Pelayanan	25.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kec. Dawarblandong	16 Laporan	10.000.000	APBD Kab		16 Laporan	20.000.000
III	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Dawarblandong</b>	<b>82%</b>	<b>195.520.000</b>	<b>APBD Kab</b>		<b>83%</b>	<b>360.000.000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>									
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	Kec. Dawarblandong	28 Dokumen	25.000.000	APBD Kab		28 Dokumen	55.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Dawarblandong	20 Dokumen	25.000.000	APBD Kab		20 Dokumen	55.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Dawarblandong	12 Dokumen	25.000.000	APBD Kab		12 Dokumen	90.000.000

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Kec. Dawarblandong	24 Dokumen	120.520.000	APBD Kab		24 Dokumen	160.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.214.446.960</b>	<b>JUMLAH</b>			<b>4.150.424.905</b>

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto tahun 2023, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

**Tabel 4.1**  
**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**KECAMATAN DAWARBLANDONG**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE SKPD : 7.01.0.00.0.00.08

NAMA SKPD : KECAMATAN DAWARBLANDONG

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.) TAHUN 2023	
					HASIL PROGRAM		HASIL KEGIATAN		KELUARAN SUB KEGIATAN			
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	UNSUR KEWILAYAHAN											
I.1	KECAMATAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kec. Dawarbl andong	Nilai SAKIP Perangk at Daerah	77,88						3.008.926.960

					Jumlah Inovasi yang terintern alisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi					
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	<b>28 Dokumen</b>			<b>13.500.000</b>
I	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		,	Kec. Dawarblandong					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000
I.1	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	6.000.000

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	<b>100 %</b>			<b>2.729.551.000</b>
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec. Dawarblandong					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	2.724.551.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						IP ASN Perangkat Daerah	<b>67,20</b>			<b>10.000.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kec. Dawarblandong					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	10.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	<b>100%</b>			<b>99.500.000</b>
	- Penyediaan Komponen Instalansi			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket	<b>1 paket</b>	8.000.000

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			ndong					Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	30.000.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<b>365 Dokumen</b>	5.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Dokumen Bahan	<b>1 Paket</b>	4.000.000

									Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		
	- Penyediaan Bahan/Material			Kec. Dawarblandong					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	<b>150 Laporan</b>	25.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Mojokerto, Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>150 Laporan</b>	7.500.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>		<b>81.375.960</b>
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	<b>12 Laporan</b>	39.975.960

									dan Listrik yang Disediakan		
	; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec. Dawarblandong					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<b>36 Laporan</b>	41.400.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	<b>100%</b>			<b>80.000.000</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. Dawarblandong					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Kendaraan	40.000.000
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	2 Gedung	25.000.000

									Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Kec. Dawarblandong					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	<b>25 Unit</b>	15.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	81%					<b>10.000.000</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						<b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>1100 Pelayanan</b>			<b>10.000.000</b>

	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Kab. Mojokerto, dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	0	0
	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Kab. Mojokerto, dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	16 Laporan	10.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>81%</b>					<b>195.520.000</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						<b>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>76 Fasilitasi</b>			<b>195.520.000</b>
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Mojokerto,					Jumlah Dokumen yang	28 Dokum	Rp 25.000.000

				Dawarblandong, Semua Desa					difasilitasi dalam Rangka Administrasi tata Pemerintahan Desa	en	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	25.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat			Kab. Mojokerto, Dawarblandong, Semua Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas,	24 Dokumen	120.520.000

										Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	
											<b>3.214.446.960</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dawarblandong, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Dawarblandong, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

#### **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2023 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Dawarblandong diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

